

## Material Vulkanis Ganggu Jalur Magelang-Yogya

AKTIVITAS membersihkan tumpukan material vulkanis luapan banjir lahar dingin dari Kali Putih, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Jateng), sejak Senin (3/1), masih dilakukan.

Sejumlah ekskavator dikerahkan untuk membersihkan tumpukan pasir dan batu yang menutup badan jalan dari sisi kanan dan kiri sepanjang hampir 500 meter. Kegiatan pembersihan juga dilakukan di sekitar sungai dan permukiman warga yang terendam pasir.

Masih adanya penumpukan material di badan jalan setinggi hingga 3 meter mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Antrean sepanjang 10 km dari Magelang ke perbatasan Yogyakarta pun tak terhindarkan. Untuk mencapai Kota Magelang, banyak pengguna jalan yang berputar ke arah Ngepos, kemudian menempuh jarak sekitar 30 km untuk sampai pusat Kota Magelang.

Sementara itu, pascabanjir lahar dingin, wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yog-

yakarta, kini terbelah dua.

Camat Cangkringan Samsul Bakri mengemukakan kondisi itu terjadi setelah enam jembatan di atas Sungai Opak terputus, sehingga untuk melewati Sungai Opak harus melalui Banjarharjo di Kecamatan Ngemplak.

Samsul Bakri menjelaskan, jembatan yang telah ambrol lebih dulu ialah Jembatan Petung dan Pagerjurang di Desa Kepuharjo serta Jembatan Kliwang dan Teplik. "Jembatan yang ambrol lebih dulu itu terjadi saat banjir lahar dingin Kali Opak pertama kalinya dulu itu, sedangkan yang kemarin ini memutuskan Jembatan Salam di Wukirsari dan Jembatan Panggung di Argomulyo."

Selain itu, putusnya Jembatan Opak di Dusun Salam, Wukirsari, juga menyebabkan jalur alternatif Magelang-Solo di sisi utara terputus.

Di Klaten, Jateng, dam penyangga di Kali Woro, Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, juga jebol diterjang luapan lahar dingin Merapi. (TS/AU/JS/N-1)



**TERGANGGU MATERIAL MERAPI:** Sejumlah kendaraan berjalan pelan saat melewati Jalan Raya Magelang-Yogyakarta Km 23 yang masih dipenuhi material vulkanis Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah, kemarin. Material tersebut sebelumnya menutup jalan saat banjir lahar dingin di Kali Putih yang meluap pada Senin (3/1) malam.

# Jaksa tidak Cermat Mendakwa Satono

Peraturan yang digunakan untuk menjerat Bupati Lampung Timur, Satono, kedaluwarsa dan tidak mengatur ketentuan pidana.

**RICO MANGIRING PURBA**

**K**EJAKSAAN Negeri Bandar Lampung tidak cermat mendakwa Bupati Lampung Timur Satono dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp10,58 miliar. Pasalnya, jaksa penuntut umum menggunakan peraturan yang sudah kedaluwarsa dalam dakwaan primer.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, yang digunakan jaksa dalam dakwaan primer, itu juga tak mengatur ketentuan pidana. "Dasar hukum yang digunakan jaksa penuntut umum kabur," kata majelis hakim Pengadilan

Negeri (PN) Tanjungkarang, Lampung, Itong Isnaeni dalam persidangan, kemarin.

Pada persidangan itu, polisi melarang wartawan meliput. Namun, Kasat Intel Polres Kota Bandar Lampung Komisaris Irawan membantah. "Kami hanya membatasi yang masuk."

Majelis hakim yang diketuai Robert Simorangkir menyatakan dalam putusan sela bahwa peraturan menteri yang telah dicabut dan direvisi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkara dugaan korupsi. Biaya perkara pun dibebankan majelis kepada negara dalam hal ini kejaksa.

Dakwaan jaksa menyatakan Satono memperoleh sekitar

Rp10,58 miliar dari pihak BPR Tripanca. Uang itu merupakan bunga dari uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Timur yang disimpan di BPR itu. BPR Tripanca memperoleh keuntungan sebesar Rp89,5 miliar yang bersumber dari sisa pokok tabung-

an dana kas daerah Kabupaten Lampung Timur.

Selain menggunakan peraturan menteri, jaksa A Kohar dalam dakwaannya menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah

dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan yang dibuat Kohar, menurut Kepala Kejari Bandar Lampung HM Suhardy, sudah sesuai dengan berkas-berkas yang ada. "Menilai dakwaan tidak cermat, itu kewenangan

hakim. Yang pasti perlawanan akan kami lakukan."

Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Eddy Rifai menyatakan jaksa masih bisa mengambil langkah banding. "Itu belum final."

Sebelumnya, pada pengadilan yang sama, bos BPR Tripanca Sugiarto Wiharjo alias Alay, 56 divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp50 miliar dengan subsider 6 bulan kurungan. Dia dijerat dengan UU No 7/1992 tentang Perbankan.

### Tersangka korupsi

Polda Jawa Barat menetapkan Sekda Kota Bandung ES dan Wakil Bupati Bandung DR sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah PMI Kota Bandung senilai

Rp5,1 miliar.

Direktur Reskrim Polda Jabar Komisaris Besar Fachrudin mengatakan penetapan status tersangka itu bermula dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kami telah menerima hasil audit BPKP dan memang ada dugaan penyimpangan," ujarnya.

Dari Jawa Tengah dilaporkan, dana korupsi yang melibatkan mantan DPRD dan mantan Bupati Temanggung baru kembali ke kas daerah sebanyak Rp1,52 miliar.

"Kami akan kejar terus," kata Kajari Temanggung Agus Budi Santoso, kemarin. (AX/TS/VK/N-4)

rico@mediaindonesia.com

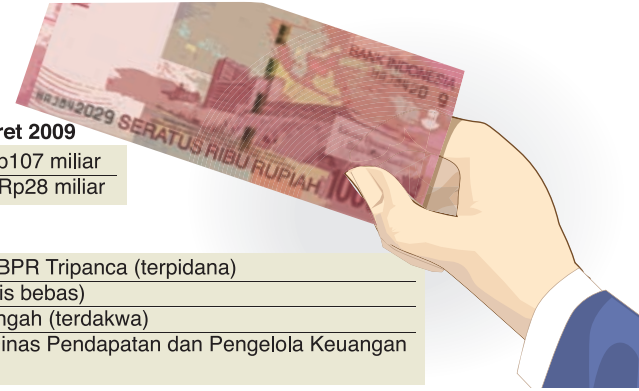
## Kasus BPR Tripanca

BPR Tripanca dilikuidasi pada 24 Maret 2009

- Menyimpan APBD Lampung Timur Rp107 miliar
- Menyimpan APBD Lampung Tengah Rp28 miliar

### Pihak yang terlibat antara lain:

- Sugiharto Wiharjo alias Alay, pemilik BPR Tripanca (terpidana)
- Satono, Bupati Lampung Timur (divonis bebas)
- Musawir Subing, Sekda Lampung Tengah (terdakwa)
- Herman Hasbullah, mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Tim MI

## Tarif KA Ekonomi akan Naik pada 8 Januari

PT Kereta Api Indonesia (KAI) di sejumlah kota mengumumkan kenaikan tarif kelas ekonomi yang diberlakukan pada 8 Januari mendatang.

Humas PT KAI Daerah Operasi (Daops) 6 Yogyakarta Eko Budiyanto mengutarakan kenaikan tarif itu dilakukan berdasar Keputusan Menteri Perhubungan no 35/2010.

Eko menyebutkan, KA ekonomi Progo relasi Lempuyangan-

Jakarta, Pasar Senen, naik dari Rp35 ribu menjadi Rp41 ribu, KA ekonomi Sritanjung relasi Lempuyangan-Banyuwangi naik dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu. KA Bengawan relasi Solo Jebres-Jakarta Tanahabang naik dari Rp36 ribu menjadi Rp43 ribu.

Menurut Eko, dengan pemberlakuan tarif baru itu, kualitas pelayanan akan dinaikkan, di antaranya dengan perbaikan

kaca jendela yang pecah, kipas angin, dan toilet. "Tentu saja kebersihan juga menjadi perhatian," ujarnya.

Dari Surakarta, Jawa Tengah, dilaporkan, tarif kereta api kelas ekonomi naik sebesar 15% pada 8 Januari. Tarif itu seharusnya mulai diterapkan pertengahan 2010, tetapi ditunda.

"Kami sudah melakukan sosialisasi kenaikan tarif KA ekonomi di Stasiun Purwosa-

ri, Solo, dengan pemasangan spanduk. Harga tiket rata-rata mengalami kenaikan antara Rp5 ribu sampai Rp6 ribu," kata staf pelayanan KA Stasiun Purwosari, Solo, Jaka Mulyana.

Contohnya, KA Kahuripan tujuan Bandung, harga tiket naik dari Rp29 ribu menjadi Rp35 ribu.

Tiket KA Logawa tujuan Purwokerto naik dari Rp26

ribu menjadi Rp30 ribu. KA Pasundan tujuan Surabaya naik dari Rp29 ribu menjadi Rp35 ribu.

Selain itu, KA Senja Bengawan tujuan Jakarta naik dari Rp37 ribu menjadi Rp43 ribu dan KA Sritanjung tujuan Surabaya naik dari Rp28 ribu menjadi Rp35 ribu.

Penaikan tarif kereta pada 8 Januari juga berlaku di Kota Medan. (AU/Ant/N-1)

## DPRD Kaltim Kritik Gubernur

KEPALA Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Sofyan Helmi mengaku pihaknya berulang kali mengirim surat penagihan dana kompensasi kepada PT Bumi Resources (BUMI), induk perusahaan tambang batu bara PT Kaltim Prima Coal (KPC). Namun, belum ada tanggapan.

"Mungkin sudah tiga sampai empat kali kami kirim surat ke mereka," katanya, kemarin. Pernyataan itu terkait keluhan Gubernur Kaltim Awang Farouk seperti kehilangan akal menghadapi BUMI untuk menagih dana kompensasi senilai Rp285 miliar sejak dua tahun lalu. Karenanya, Awang Farouk lebih memilih menyerah dan melimpahkan ke DPRD Kaltim atas tagihan kompensasi itu.

Dana itu sebagai kompensasi pencabutan gugatan divestasi saham KPC di International Center for Settlement of Investment Dispute atau Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi, yang berkedudukan di Singapura. Sikap Gubernur Kaltim yang melempar masalah ke DPRD menuai kritikan dari Ketua Komisi II DPRD Kaltim Rusman Yakub. Ia berpendapat Gubernur mestinya paham bahwa soal teknis penagihan adalah wewenang Pemprov. "Itu wilayahnya Pemprov atau eksekutif, kenapa lagi ke dewan."

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Kaltim Datuk Ya-

sir Arafat berpendapat Fraksi PDIP akan terus mengawal persoalan penagihan kompensasi tersebut. Alasannya, hal itu sudah dikonsultasikan ke BPK Perwakilan Samarinda dan telah dimasukkan ke batang tubuh APBD Kaltim 2008.

**Fraksi PDIP akan terus mengawal persoalan penagihan kompensasi tersebut."**

**Datuk Yasir Arafat**  
Anggota Fraksi PDIP DPRD Kaltim

Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi (Minerbabum) Bambang Setiawan menilai persetujuan antara Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk Ishak dan BUMI di luar tanggung jawab mereka. Untuk itu, mereka tidak akan ikut campur alias turut memaksa BUMI untuk memenuhi janji kompensasi Rp285 miliar kepada Pemprov Kaltim.

Sementara Presiden Komisaris PT Bumi Resources Tbk Suryo Bambang Sulistyono yang juga Ketua Umum Kadin mengatakan segera menanyakan masalah dana kompensasi itu pada rapat Dewan Komisaris beserta jajaran direksi. "Saya akan tanyakan pada rapat nanti," ujar Suryo via layanan pesan singkat. (SY/\*N-1)

## Dijemput Maut di Kandang Tiwul



**ENAM TEWAS:** Salah seorang korban tewas dibawa pulang dari rumah sakit di Desa Jebol, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah, kemarin. Enam bersaudara tewas akibat mengonsumsi tiwul pada Jumat (31/12).

GERIMIS mengguyur pantura. Tampak hanya beberapa kendaraan melintas di sepanjang ruas Kudus-Jepara, Jawa Tengah. Toh, kesibukan di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, yang terletak dalam ruas tersebut terbilang ramai.

Tak hanya dalam pasar dan sekat-sekat kantor, di tengah perkampungan warga masih membicarakan tragedi tiwul. Makanan berbahan baku singkong itu telah merenggut nyawa enam bersaudara.

Situasi Mayong kontras dengan riuhnya permukiman di Jepara, kota terdekat. Wilayah itu begitu lengang.

Tiba di depan rumah papan, di RT 06/RW 3 Desa Jebol, Mayong, duka menggayut di wajah pasangan Jamhamid, 45, dan Siti Sunayah, 41. Kursi

plastik juga masih berjejer di halaman rumah yang tak terlalu lebar, pelayat terus berdatangan usai pemakaman enam bersaudara anak pasangan tersebut.

Enam anak Jamhamid-Sunayah meninggal setelah mengonsumsi tiwul buatan ibu mereka yang diolah dari singkong hasil kebun sendiri. Mereka adalah Lutfiana, 22, Waridatus Solehah, 15, Muhammad Hisyam Ali, 13, Saidatul Kusniah, 8, Ahmad Kusriyanto, 5, dan Abdul Amin, 3.

Korban sempat dilarikan ke RSU Kartini, Jepara. Namun, jiwa mereka tak terselamatkan. Hanya sang kakek, Fihri, 70, yang bertahan dan dibawa setelah lima hari menjalani perawatan.

"Saya trauma makan tiwul.

Tidak menyangka tiwul buatan istri untuk sarapan telah merenggut anak-anak," kata Jamhamid lesu.

Sebagai buruh tani dengan penghasilan tak lebih dari Rp20.000 per hari, Jamhamid menghemat penggunaan jatah raskin dan uang Rp5.000 dengan sarapan tiwul. Mengingat sekali makan, keluarga ini membutuhkan setengah kg beras, sedangkan dengan tiwul hanya cukup Rp1.500 per kg.

Bupati Jepara Hendro Martojo termasuk yang kaget dengan tragedi tiwul di daerahnya. Karena bagi masyarakat Jawa Tengah, tiwul merupakan konsumsi masyarakat pada umumnya. Bahkan di perkotaan banyak dijual tiwul. (Akhmad Safuan/N-3)